

TAJUK RENCANA

Hindari, Modus Jual Beli Jabatan!

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, dalam periode 2016-2021 ada tujuh kasus jual beli jabatan yang dilakukan kepala daerah (kepda) dan kasusnya ditangani KPK. Sebagaimana diberitakan *KR*, Kamis (2/9), menurut Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, jual beli jabatan menjadi salah satu modus korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah.

Selain itu, KPK juga mengidentifikasi beberapa sektor yang rentan terjadi korupsi, di antaranya terkait belanja daerah seperti pengadaan barang dan jasa. Selain itu korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat dan korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan.

Dari situ kita melihat memang banyak peluang kepala daerah untuk melakukan korupsi atau tindak penyelewengan. Karena itu, pengawasan kepada kepala daerah memang perlu terus dilakukan, baik secara internal melalui sistem dan mekanisme yang ada, maupun pengawasan secara eksternal melalui berbagai lembaga yang sudah dibentuk maupun oleh masyarakat (termasuk di dalamnya LSM).

Mendagri Tito Karnavian, sebagaimana diberitakan koran ini kemarin, juga sudah meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat pengawasan internal dengan meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mendagri menilai, pengawasan tersebut penting demi mengurangi moral hazard untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi.

Sebagaimana diketahui bersama, untuk menjadi kepala daerah memang membutuhkan biaya sangat besar. Bukan hanya puluhan atau ratusan juta, tetapi angkanya sampai miliar. Antara lain untuk membiaya kegiatan kampanye, fasilitas kampanye, memberi fasilitas umum agar ma-

sarakat memilihnya, sampai membayar honor saksi di semua TPS. Konon dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan resmi yang diperoleh setiap bulan. Bahkan dengan akumulasi pendapatan resmi selama menjabat pun belum *buk*.

Maka di masyarakat sering muncul rasanan, pasti setelah menjabat akan berusaha *golek balen*. Apalagi kalau masih ingin menjabat untuk periode berikutnya, konon juga akan mencari bekal untuk maju lagi. Mungkin pendapatan tidak resmi itu bisa diraih melalui berbagai indikator korupsi yang sudah disebutkan di atas. Antara lain melalui jual beli jabatan. Terbukti sudah ada 7 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Sementara itu dengan adanya jual beli jabatan pasti akan menimbulkan rentetan korupsi berikutnya. Sebab, orang yang menduduki jabatan karena menyuap, tidak tertutup kemungkinan akan *golek balen* juga dengan menyalahgunakan jabatannya. Akhirnya korupsi akan terus merajalela.

Karena itu modus jual beli jabatan kiranya termasuk aspek yang perlu terus dilakukan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Tentu aksi korupsi ini akan dilakukan secara rapi, baik oleh penjual maupun pembelinya. Namun aparat terkait pasti punya banyak kiat untuk mengendusnya. Selain itu masyarakat yang mengetahui, misalnya yang gagal karena tidak menyuap, tidak perlu ragu menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang. Sedang secara internal mestinya dibuat sistem dan mekanisme rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan dengan segala macam aturan yang profesional dan semua proses dilakukan secara transparan.

Terkait korupsi, kita semua memang masih perlu terus kerja keras dalam melakukan antisipasi maupun penindakan. Karena itu peran serta berbagai pihak sangat diperlukan. □

MURAL berada pada persimpangan antara seni dan vandalisme, karenanya ruang kosong bisa menjadi indah ataupun rusak. Terlepas dari pro-kontra atas maraknya mural di ruang-ruang publik, saat ini mural menjadi lebih dari sekadar aksi mencoret-coret tembok. Seni lukis tersebut dapat menjadi media ekspresi publik untuk mencurahkan pendapatnya, terutama kritik atas kebijakan publik.

Pemberitaan mengenai penghapusan mural yang sering terdengar belakangan ini, mencerminkan sikap dari penguasa yang terkesan anti-kritik. Tidak sekadar menghapus muralnya, pembuat mural tertentu konon juga tengah dicari-cari. Hal tersebut menunjukkan bahwa mural benar-benar dapat menjadi media kritik efektif, tercermin dari bagaimana pihak yang dikritik merespons kritikan tersebut.

Pencekalan

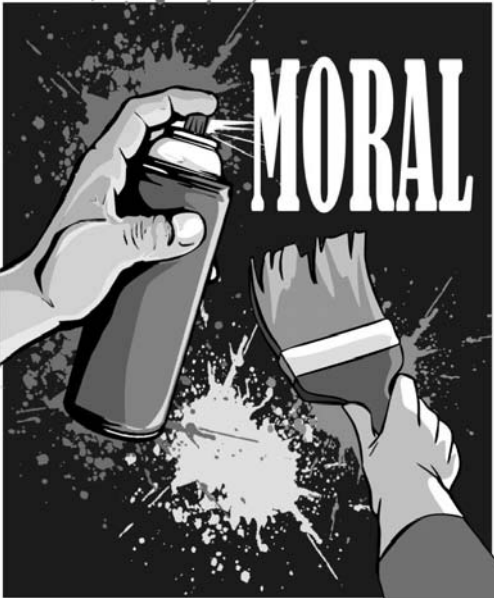
Apabila pencekalan mural dilakukan dengan dalih mengganggu ketertiban umum ataupun merusak fasilitas publik, lalu bagaimana dengan selebaran poster dan baliho dari politisi yang terkadang ‘menyerobot’ ruang-ruang kosong menjelang pemilihan umum? Aparat perlu menyikapi keduanya secara proporsional. Perusak fasilitas umum memang perlu diadili atas tindakannya, namun bukan karena ekspresinya. Pencekalan atas ekspresi yang bahkan tidak merugikan siapapun, tentu merupakan kemunduran dalam berdemokrasi.

Muralisasi kritik, terlebih pada tempat yang tepat, justru patut diapresiasi karena menjadi manifestasi pengawasan publik atas kinerja dari sosok-sosok yang dipilihnya pada pemilihan umum atau pemilihan legislatif melalui jalur keindahan. Hal ini sebenarnya bukanlah barang baru, sebuah lembaga negara pernah mengadakan lomba kritik melalui *stand-up comedy*. Artinya, apabila ruang untuk melakukan kritik tersebut difasilitasi, maka justru mural-mural tersebut akan menjadi ruang kritik yang estetis dan ter-

Thoriq Tri Prabowo

lokalisasi tanpa merusak fasilitas publik.

Alih-alih mengapresiasinya dengan menyediakan fasilitas, pemangku kebijakan justru memilih jalan untuk melakukan penghapusan mural. Penghapusan mural tersebut ternyata tidak membuat publik jera, malah memicu kreativitas lainnya. Belum lama ini terdapat lomba mural, bukan lomba terkait aspek seni maupun kreativitas mural, melainkan



KR-JOKO SANTOSO

kan mural yang paling cepat dihapus lah yang akan menjadi juaranya.

Prinsip mengenai bagaimana mural mampu menjangkau alam bawah sadar juga perlu dipahami pembuat mural. Selain membuat mural yang mampu ‘menggangu’ pemangku kebijakan, seniman mural juga perlu membuat mural yang mampu memicu optimisme publik. Dengan demikian publik juga akan merasa bahwa pembangunan bangsa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga bergantung atas kontribusi mereka.

Momentum Kolektif

Persoalan mengenai mural baru-baru

ini dapat menjadi momentum kolektif sebagai rem moral, baik untuk pemangku kebijakan maupun masyarakat. Untuk pemangku kebijakan, seni yang dibuat masyarakat perlu dijawab dengan seni dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan. Apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah berpihak pada masyarakat atau belum. Kesejahteraan masyarakat sudah semestinya menjadi landasan utama dalam mengambil kebijakan.

Di sisi lain, ketika pemangku kebijakan tengah melakukan evaluasi atas kinerjanya, publik juga perlu merefleksikan peran dan kontribusinya sebagai warga negara. Bisa jadi persoalan-persoalan sosial yang terjadi justru terjadi karena abainya publik terhadap perannya. Sebagai contoh, di masa pandemi Covid-19, masih banyak publik yang abai terhadap protokol kesehatan sehingga pandemi tidak kunjung berakhir. Dalam hal ini publik turut menjadi penyebab persoalan yang mereka visualisasikan melalui mural.

Mural adalah visualisasi dari ekspresi kritik publik. Pemangku kebijakan cukup menyikapinya secara proporsional, tanpa perlu bertindak represif. Memberikan ruang untuk berekspresi justru akan memperkuat hubungan pemangku kebijakan dan masyarakat. Yakni hubungan antara pembuat kebijakan dengan pengawasnya. □

*) **Thoriq Tri Prabowo MIP**, Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Keistimewaan dan Keagamaan di Yogya

BAGI orang-orang beragama, Keistimewaan DIY diyakini dan disyukuri sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) yang berumur 9 tahun telah menjadi berkah bagi semua kelompok agama dan sistem kepercayaan yang tumbuh di Yogya. Karena itu semua warga DIY dari latar belakang apa pun agamanya perlu mendukung pelaksanaan UUK untuk mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

UUK memberi dua landasan penting bagi kehidupan keagamaan yang kondusif di Yogya. Pertama, Pasal 5 UUK menegaskan bahwa salah satu tujuan Keistimewaan Yogya adalah mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang berbasis pada prinsip ke-bhineka-tunggal-ika-an. Kedua, Pasal 7 UUK menegaskan bahwa pembangunan kebudayaan merupakan salah satu urusan yang merupakan kewenangan istimewa DIY.

Kerukunan

Penekanan pada prinsip ke-bhineka-tunggal-ika-an menjadi dasar kerukunan semua kelompok agama yang ada di DIY. Konflik SARA sudah terjadi di mana-mana akibat rendahnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman. Fanatisme dan radikalisme terjadi manakala keberagaman agama-agama tidak diakui dan dihormati secara baik dan benar.

UUK DIY juga memberi mandat kepada pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama membina kerukunan antar umat beragama. Pasal 5 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa tujuan Keistimewaan DIY adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an. Artinya, keharmonisan SARA (Suku, Ras & Agama)

Philipus Setyanto

adalah visi Keistimewaan Yogya. Lalu pada ayat (4) dijabarkan bahwa kebhinekaan itu diwujudkan dengan (a) pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh Pemerintahan Daerah DIY, dan (b) pemeliharaan dan pen-dayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, dan toleransi oleh Pemerintahan Daerah DIY dan masyarakat DIY.

Di dalam kebudayaan Yogya terdapat ungkapan *agama ageming aji* yang menjadi pedoman etika dan moral dalam hidup beragama. Agama itu ibarat busana (*ageman*) seorang raja atau pribadi yang mulia. Busana kerajaan tentunya serba indah dan istimewa sehingga hanya seorang rajalah yang layak memakainya. Adapun figur raja merepresentasikan pribadi mulia dengan karakter dan kepribadian yang luhur. Artinya, beragama harus dilandasi dengan praktik etika dan moral yang adiluhung.

Ungkapan *agama ageming aji* menjelaskan mengapa ada orang beragama atau orang yang mengaku beragama berbuat jahat. Hal itu seperti busana kerajaan yang bisa disalahgunakan orang-orang yang tidak ber-karakter dan tidak berkepribadian luhur. Politisi kotor memakai agama sebagai alat kekuasaan. Kaum kapitalis serakah memanfaatkan agama untuk melancarkan kolonialisme ekonomi. Para penjahat kemanusiaan menggunakan agama sebagai alat pembenaran aksi-aksi kejahatannya.

Alat Politik

Hoaks, niat busuk terhadap lawan politik, yang merebak di tahun-tahun politik patut diwas-

padai berkaitan dengan politik itu sendiri. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syaifi Maarif mengatakan bahwa saat agama dijadikan alat politik, orang mudah sekali mengembangkan kultur kebencian. Tindakan intoleran tumbuh dari hati yang dipenuhi kebencian, lahir dari kepribadian yang buruk, bukan dari agama atau kebudayaan yang luhur.

Prinsip *agama ageming aji* di sisi lain menuntut kaum agamawan untuk membentuk pribadi-pribadi berkarakter mulia seperti seorang raja yang arif dan bijaksana. Semua agama dan kebudayaan Yogya sama-sama mengajarkan dan membentuk kepribadian mulia. Dengan demikian Keistimewaan DIY dan kebhinnekaan keagamaan di DIY adalah dua energi yang akan melahirkan manusia-manusia Yogya yang mulia. Hal itu menjadi ukuran keberhasilan dari implementasi Keistimewaan dan keagamaan DIY. □

*) **Philipus Setyanto ThM**, Wakil Ketua Umum DPP Majelis Umat Kristen

Pojok KR

Tempat wisata di DIY diburu.

-- Sudah banyak yang jenuh.

Musik tradisi masuk pendidikan formal. -- Bagaimana kesiapan pihak terkait?

Sebagian wilayah rawan bahaya keke-
ringan.

-- Lantas antisipasinya bagaimana?

Berabe

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mუსahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwι, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandrkyk23@yahoo.com, iklandrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’..Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris), Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSC. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti.

Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.